



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2023

Agus Uji Hantara

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi
Agustus 2023

bangga
melayani
bangsa



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

MILESTONE EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

**PermenPANRB
Nomor 14
Tahun 2014**

2014-2019

Membangun Komitmen

- Fokus pelaksanaan RB adalah membangun komitmen kepatuhan IP
- Fokus penilaian lebih menitikberatkan pada kepatuhan (pemenuhan dan administrasi)

**PermenPANRB
Nomor 26
Tahun 2020**

2020-2024

**Mendorong Percepatan
Perubahan**

Pelaksanaan RB tidak hanya membangun komitmen, namun juga melihat perubahan yang dihasilkan pada tata Kelola pemerintahan

**PermenPANRB
Nomor 9
Tahun 2023**

Mulai 2023

**Mewujudkan Birokrasi
Berdampak**

Pelaksanaan RB diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LATAR BELAKANG



Evaluasi RB Berdampak

Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PENAJAMAN DAN PENYEDERHANAAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI



Lebih mengukur hasil
dan dampak
dibandingkan dengan
proses



Menghilangkan kesan
penilaian yang bersifat
administratif



Harmonisasi, integrasi
dan sinergitas indikator
penilaian reformasi
birokrasi

TUJUAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi di lingkungan internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta dampaknya terhadap permasalahan strategis di masyarakat dan prioritas aktual Presiden

Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya

Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah

Menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PRINSIP PELAKSANAAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

DINAMIS

Evaluasi Reformasi Birokrasi memungkinkan perubahan pada indikator yang digunakan jika terjadi kondisi mendesak yang menyebabkan perubahan

HOLISTIK

Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu memotret berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang dianggap terkait dengan pencapaian sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi

ORIENTASI HASIL

Evaluasi Reformasi Birokrasi berfokus untuk mengukur hasil atau dampak dari upaya yang telah dilakukan

KOLABORATIF

Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan oleh berbagai pihak, lintas sektor atau kementerian/lembaga dengan menekankan kesamaan tujuan

SINERGIS

Penggunaan indikator dalam evaluasi Reformasi Birokrasi yang selaras atau harmonis satu sama lain

JENIS DAN PELAKSANA

Jenis Evaluasi

Pelaksana Evaluasi

Evaluasi Internal

Evaluasi Eksternal

**Evaluator
Internal**

**Evaluator
Eksternal**

APIP masing-masing K/L/D atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan Evaluasi Internal reformasi birokrasi di instansinya

Evaluator Meso

K/L yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya

Evaluator Nasional

Tim evaluator yang ditetapkan oleh Ketua UPRBN yang berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/D

PELAKSANA (Evaluator Eksternal)



GAMBARAN UMUM PROSES EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

EVALUASI INTERNAL

PROSES PEMBANGUNAN RB PADA INSTANSI PEMERINTAH

PERENCANAAN RB

Penyusunan
Road Map RB

Penyusunan
Rencana Aksi RB

Evaluasi Perencanaan
(*Ex-Ante*)

01

PELAKSANAAN RB

Pelaksanaan
Rencana Aksi RB

Evaluasi Pelaksanaan
(*On-Going*)

02

EVALUASI EKSTERNAL

Evaluasi Pasca
Pelaksanaan
(*Ex-Post*)

03

Penyampaian
Laporan Hasil
Evaluasi
Eksternal

Saran dan rekomendasi untuk menyempurnakan rencana aksi

Evaluasi dilakukan untuk memastikan *road map* dan Rencana Aksi RB memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan K/L/D

Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi

Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil/dampak pelaksanaan RB, memberi saran dan rekomendasi, serta menyusun profil perkembangan pelaksanaan RB di Indonesia

Evaluator Internal

Evaluator Eksternal



KOMPONEN PENILAIAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Dimensi RB General

Capaian Strategi Pelaksanaan RB General

1. sub komponen kualitas rencana aksi, serta
2. sub komponen implementasi rencana aksi

Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB

1. 16 Indikator* pada Sasaran Strategis 1 "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif"
2. 2 Indikator* pada Sasaran Strategis 2 "Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional"



17 Kebijakan
Percepatan RB

Capaian Sasaran Strategis RB

Sasaran Strategis 1 "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif"

1. Indeks SPBE;
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja; dan
3. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Sasaran Strategis 2 "Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional"

1. SPI;
2. SKM;
3. Indeks BerAKHLAK; dan
4. *Employer Branding***

Dimensi RB Tematik

Kementerian/Lembaga

Capaian Rencana Aksi RB Tematik

Capaian Indikator Dampak RB Tematik

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan
2. Peningkatan Realisasi Investasi
3. Tingkat Inflasi
4. Tingkat Penggunaan PDN
5. *Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerintahan setiap tahunnya*

Pemerintah Daerah

Strategi Pelaksanaan RB Tematik

Capaian Indikator Dampak RB Tematik

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan
2. Peningkatan Realisasi Investasi
3. Tingkat Inflasi
4. Tingkat Penggunaan PDN
5. *Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerintahan setiap tahunnya*

Akan diatur secara detail dalam Keputusan Menteri

*) Terdapat penyesuaian nomenklatur indikator pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023

**) Tidak dilakukan penilaian di tingkat mikro

INDIKATOR PENILAIAN RB GENERAL*

Sasaran Strategis 1.
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif

Indikator Capaian Sasaran Strategis RB

1. Indeks SPBE
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja
3. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB

- | | |
|--|--|
| 1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi | 10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| 2. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi | 11. Indeks Pengelolaan Aset |
| 3. Transformasi Layanan Digital | 12. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan |
| 4. Tingkat Maturitas SPIP | 13. Indeks Kualitas Kebijakan |
| 5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI | 14. Indeks Reformasi Hukum |
| 6. Nilai SAKIP | 15. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor |
| 7. Indeks Perencanaan Pembangunan | 16. Indeks Tata Kelola Pengadaan |
| 8. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE | |
| 9. Tingkat Digitalisasi Arsip | |

Sasaran Strategis 2.
Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

Indikator Capaian Sasaran Strategis RB

1. Survei Penilaian Integritas (SPI)
2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
3. Indeks BerAKHLAK
4. *Employer Branding*

Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB

1. Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK)
2. Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)

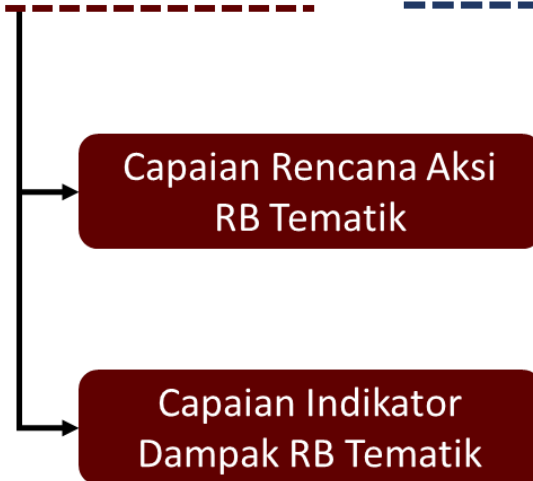
**)Akan diatur secara detail dalam Keputusan Menteri*

menpan.go.id

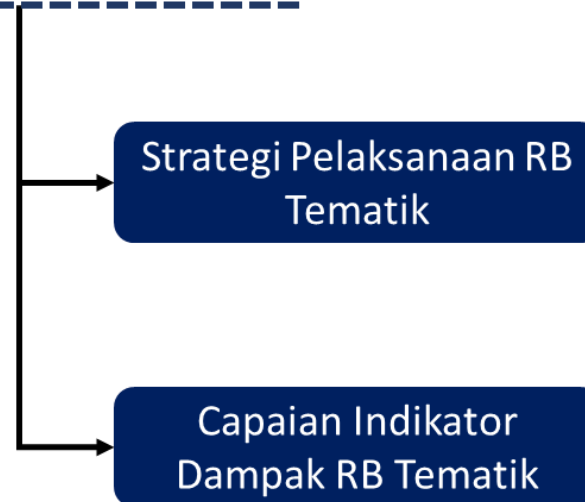


INDIKATOR PENILAIAN RB TEMATIK*

Evaluasi RB Tematik Kementerian/Lembaga



Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah



Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi		
Kategori	Nilai	Predikat
AA	>100	Sangat Memuaskan
A	>80-100	Memuaskan
A-		Memuaskan dengan Catatan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

**)Akan diatur secara detail dalam Keputusan Menteri*

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi		
Kategori	Nilai	Predikat
AA	>100	Sangat Memuaskan
A	>80-100	Memuaskan
A-		Memuaskan dengan Catatan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Evaluator Internal

- Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) dilaporkan kepada tim/unit pelaksana RB internal dengan tembusan kepada evaluator nasional melalui sistem informasi evaluasi RB Nasional.
- Hasil evaluasi *ex-ante* disampaikan paling lambat pada **akhir triwulan pertama** (minggu akhir bulan Maret),
- Hasil evaluasi on-going disampaikan paling lambat pada **minggu pertama triwulan berikutnya**.
- Memuat catatan hasil evaluasi, serta rekomendasi konkret untuk perbaikannya

Evaluator Meso

- Evaluator meso melaporkan hasil penilaian yang merupakan komponen dari indeks RB dan menjadi tanggung jawabnya.
- Hasil penilaian evaluator meso disampaikan kepada evaluator nasional paling lambat **15 November setiap tahun** melalui sistem informasi evaluasi RB Nasional.

Evaluator Nasional

- Evaluator nasional melaporkan hasil evaluasi akhir pelaksanaan RB kepada K/L/D y paling lambat **minggu keempat bulan Desember**.
- Memuat besaran indeks RB K/L/D serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB K/L/D

**panrb**KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Koefisien

01

Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau Pegawai K/L/D

02

Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan

03

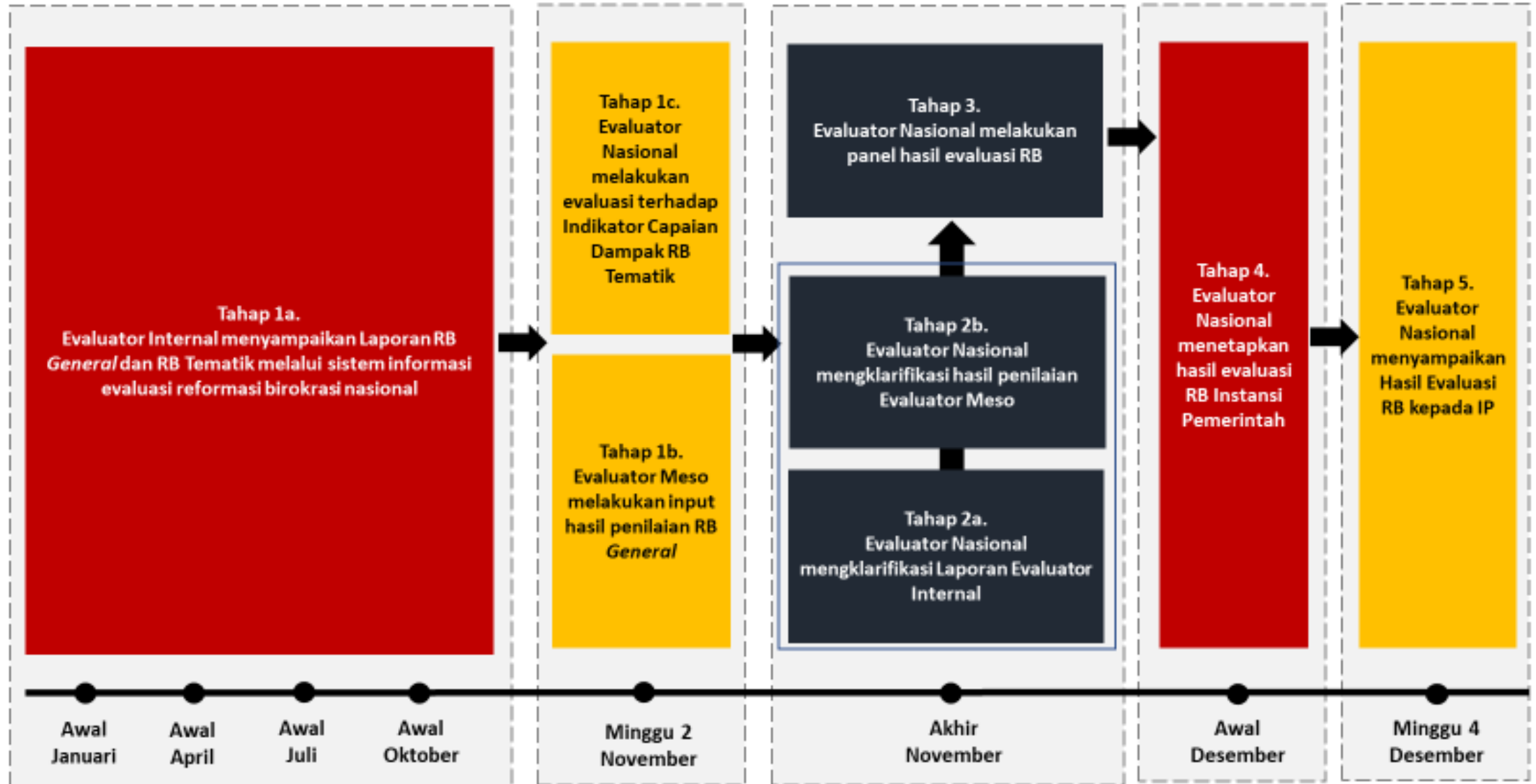
Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi



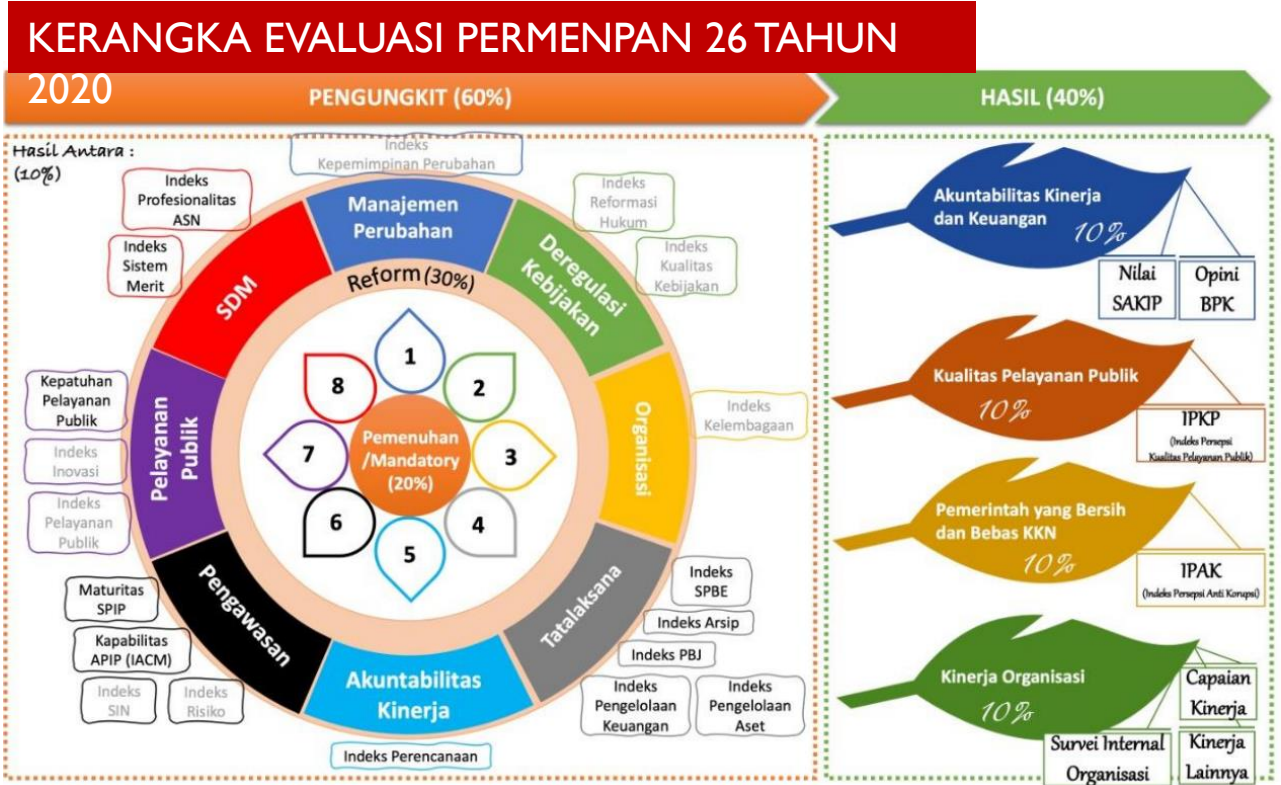
panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

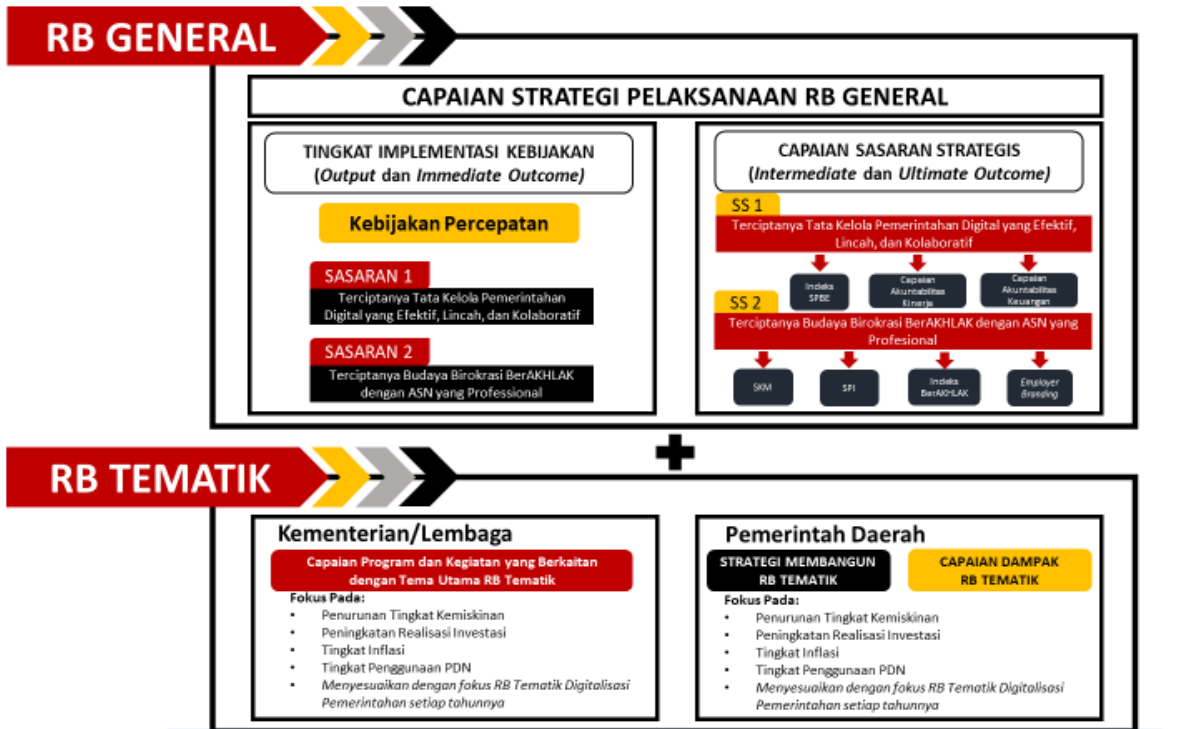
Timeline Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi



Perbedaan yang lama dan yang baru



KERANGKA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK



KOMPONEN PERTANYAAN

157

PEMENUHAN

102

REFORM

INDIKATOR PENILAIAN

4

STRATEGI

25

HASIL



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

bangga
melayani
bangsa